

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(SDGs) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

TANTYO NANDI PURWOKO



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

TANTYO NANDI PURWOKO

Pertumbuhan perekonomian di Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan dan perkembangan yang pesat sebesar 8,33% dari 1.184.949 total penduduk, tetapi masih terdapat tingginya angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung yang cenderung melambat. *Sustainable Development Goals* (SDGs) diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, dan mengurangi kesenjangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan menunjukkan bahwa : 1) Standar dan tujuan kebijakan sudah berhasil menerapkan nilai implementasi. 2) Sumber daya kurang berhasil menerapkan nilai implementasi. 3) Disposisi atau sikap para pelaksana cukup berhasil menerapkan nilai implementasi. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu program keluarga harapan (PKH), program keluarga harapan (PKH) sudah mencapai tujuannya yang tepat objek dan tepat sasaran penerimanya, sehingga dapat memberikan hasil yang baik dalam menanggulangi angka kemiskinan terdapat 34.444 dari total 76.553 rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Kota Bandar Lampung yang telah memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Artinya, sebesar 44.99% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Kota Bandar Lampung yang telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Maka, kesimpulan pada penelitian ini sudah berhasil menerapkan nilai implementasi kebijakan.

Kata Kunci : Kemsiskinan, Kota Bandar Lampung, *Sustainable Development Goals* (SDGs)

ABSTRACT

PROGRAM IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) IN POVERTY REDUCTION IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

TANYO NANDI PURWOKO

Economic growth in Bandar Lampung City has increased and developed rapidly by 8.33% of the 1,184,949 total population, but there is still a high poverty rate in Bandar Lampung City which tends to slow down. The Sustainable Development Goals (SDGs) are expected to alleviate poverty in Bandar Lampung City. The indicators of the Sustainable Development Goals (SDGs) are no poverty, no hunger, economic growth and decent work, and reducing inequality. The purpose of this study was to determine the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) program in poverty alleviation in the City of Bandar Lampung. The method in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The results of the research on the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in alleviating poverty show that: 1) Standards and policy objectives have succeeded in implementing implementation values. 2) Resources are less successful at implementing value implementation. 3) The disposition or attitude of the executors is quite successful in implementing implementation values. The Sustainable Development Goals (SDGs) the Family Hope Program (PKH), the Family Hope Program (PKH) has achieved its objectives with the right object and targeted recipients, so that it can provide good results in overcoming poverty there were 34.444 out of a total of 76.553 households that had received the Family Hope Program (PKH) assistance. Meaning, 44.99% of households with the lowest welfare status in the city of Bandar Lampung have received assistance from the Family Hope Program (PKH). Thus, the conclusions in this study were successful in implementing the value of policy implementation.

Keywords: *Poverty, Cities Bandar Lampung, and Sustainable Development Goals (SDGs)*

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(SDGs) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

TANTYO NANDI PURWOKO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)* DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Tantyo Nandi Purwoko

No Pokok Mahasiswa : 1816021025

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP. 196007291990101001

Bendi Juantara, S.I.P., M. A
NIP. 198809232019031011

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P
NIP. 19611218198902100

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Denden Kurnia Drajat, M. Si.

Sekretaris : Bendi Juantara, S.I.P., M. A

Penguji : Dr. Feni Rosalia, M. Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071978032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 April 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 April 2023
Yang Membuat Pernyataan



Tantyo Nandi Purwoko
NPM. 1816021025

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2000 dengan nama lengkap Tanty Nandi Purwoko sebagai anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Edi dan Ibu Diana. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Gunung Sakti pada tahun 2012. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Menggala pada tahun 2015, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama Penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non-akademik demi menunjang kapasitas diri penulis.

Demikian sekelumit aktivitas Penulis pada masa perkuliahan, sejak rentang tahun 2018-2022. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha merupakan kinerja Penulis yang bertujuan sebagai jalan menuju hidup yang lebih bermanfaat.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, pasti akan mencari jalannya sendiri untuk menemukanmu”

Ali bin Abi Thalib

“Seorang pemuda tidak akan sia-sia kecuali dengan empat perkara; agama, amanah, menjaga diri, dan kesungguhan”

Imam Syafi'i

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahilabbilamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Kedua Orang Tuaku tercinta Ayahanda Edi dan Ibunda Diana

Yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang, nasihat, doa, dukungan, dan perjuangan yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis. Terima kasih yang tiada tara kepada ayah dan ibu karena telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis tanpa lelah. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan di dunia maupun akhirat, Aamiin.

Adik-Adikku yang kukasih Azzahra dan Kayla

Yang telah memberikan dukungan, nasihat, doa serta motivasi semangat dalam proses mencapai impianku.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku

Yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi tiada henti dalam susah maupun senang.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Program *Sustainable Development Goals (SDGs)* Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung”. Sanjungan shalawat dan tak khilaf tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolutioner sejati yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya, serta telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan menjadi alam yang terang benderang sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada, tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Kepada Allah SWT atas segala apa yang Engkau berikan kepada hambamu yang selalu khilaf atas segala nikmat-Mu. Terima kasih atas segala limpahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam yang selalu tercurah dalam setiap proses hidup yang hamba jalani, terimakasih atas kebesaran-Mu yang selalu

memberikan kedamaian jiwa, serta hati yang lapang dalam menempuh kesulitan dihadapi.

2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan nasihat kepada penulis selama menjadi mahasiswa dan selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu memberikan bimbingan, saran, dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Bendi Juantara, S.I.P., M.A selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan berharga bagi penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Ferry Hartawijaya selaku Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden pada penelitian ini.
10. Ibu Dr. Rein Susinda Hesty, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden pada penelitian ini.

11. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Edi dan Ibu Diana. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan, perhatian, dan segalanya yang telah kalian berikan kepada penulis. Semoga kelak penulis dapat menjadi kebanggaan keluarga dan dapat membahagiakan kalian.
12. Adik-adikku tersayang, Azzahra dan Kayla, terima kasih telah memberikan kasih sayang, dukungan moral dan materil, doa, serta menjadi pemacu semangatku. Semoga kelak penulis dapat membahagiakan serta membalas kebaikanmu.
13. Seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan 2018 yang telah kebersamai, saling mendukung selama proses perkuliahan, dan sukses untuk kalian semua.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT.
15. Alamamaterku tercinta Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga besar harapan penulis akan kritik dan saran guna menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandarlampung, 29 Maret 2023

Penulis

Tantyo Nandi Purwoko

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan tentang Implementasi	12
2.2 Tinjauan tentang <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	15
2.3 Tinjauan tentang Kemiskinan	20
2.3.1 Pengertian Kemiskinan	20
2.3.2 Penyebab Kemiskinan	22
2.3.3 Penanggulangan Kemiskinan	25
2.4 Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Informan Penelitian	35
3.5 Jenis Data	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Pengolahan Data	39
3.8 Teknik Analisis Data	41
3.9 Teknik Validitas Data	42

IV. GAMBARAN UMUM

4.1	Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	45
4.1.1	Sejarah Terbentuknya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	45
4.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	46
4.1.3	Struktur Jabatan Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	46
4.1.4	Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	47
4.2	Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung Lampung	48
4.2.1	Sejarah Terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung.....	48
4.2.2	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung.....	50
4.2.3	Struktur Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung.....	51
4.2.4	Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung.....	52
4.3	Gambaran Umum <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Kota Bandar Lampung	53
4.3.1	Sejarah Terbentuknya <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Kota Bandar Lampung	53
4.3.2	Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Kota Bandar Lampung.....	55

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	Hasil	56
5.1.1	Standar dan Tujuan Kebijakan.....	57
5.1.2	Sumber Daya.....	64
5.1.3	Disposisi atau Sikap Para Pelaksana	70
5.1.4	Program Keluarga Harapan (PKH).....	73
5.2	Pembahasan	75
5.2.1	Standar dan Tujuan Kebijakan.....	75
5.2.2	Sumber Daya.....	87
5.2.3	Disposisi atau Sikap Para Pelaksana	92
5.2.4	Program Keluarga Harapan (PKH).....	96
5.3	Hubungan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	99
5.3.1	Tanpa Kemiskinan	99
5.3.2	Tanpa Kelaparan	100
5.3.3	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak	101
5.3.4	Mengurangi Kesenjangan.....	102
5.4	Triangulasi Data	103

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1	Simpulan	107
6.2	Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Data Penduduk Miskin di Lampung	5
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3 Indikator Global ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	16
Tabel 4 Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan	25
Tabel 5 Informan Penelitian	35
Tabel 6 Struktur Jabatan Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	46
Tabel 7 Struktur Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung	51
Tabel 8 Garis Kemiskinan di Kota Bandar Lampung	58
Tabel 9 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Kepadatan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung	58
Tabel 10 Pencari Kerja yang Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	59
Tabel 11 Tenaga Kerja Asing yang Bekerja pada Perusahaan di Kota Bandar Lampung	59
Tabel 12 Presentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Bandar Lampung	59
Tabel 13 Indikator Penanggulangan Kemiskinan	67
Tabel 14 Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Monitoring Pelaksanaan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	81
Tabel 15 Triangulasi Data	103

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Tingkat Kemiskinan di Kota Bandar Lampung	3
Gambar 2 Kerangka Pikir	28
Gambar 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	64
Gambar 4 Sosialisasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	66
Gambar 5 Strategi Pengentasan Kemiskinan.....	68
Gambar 6 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Center Universitas Lampung ...	72
Gambar 7 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Center Universitas Bandar Lampung.....	73

DAFTAR SINGKATAN

BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BMPLK	: Bantuan Modal Pinjaman Lunak dan Koperasi
BPS	: Badan Pusat Statistik
DBUKID	: Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang
FORKOPIMDA	: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
GEMMA	: Gerakan Masyarakat Membangun
HAM	: Hak Asasi Manusia
KB	: Keluarga Berencana
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KUBE	: Kelompok Usaha Bersama
LKM	: Lembaga Keswadayaan Masyarakat
LPPKD	: Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
MDGs	: <i>Millennium Developments Goals</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Developmen</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKH	: Program Keluarga Harapan
POSDAYA	: Pos Pembedayaan Masyarakat
PPKP	: Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan
P2KP	: Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan Pegawai
PPMB	: Program Pemberdayaan Masyarakat, Berkelanjutan
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
PPUSEP	: Peningkatan Pelayanan Usaha Sosial Ekonomi Produktif
PUKK	: Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>

SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMNANGKIS	: Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TKM	: Tenaga Kerja Mandiri
TKPK	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
UNDP	: <i>United Nations Development</i>
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, sistematis dan masif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat, pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujudkan, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan, hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “Kesejahteraan merupakan hak bagi setiap warga Negara dan tanggung jawab penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan”. Berupaya mengambil langkah-langkah konkrit untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial termasuk keluarga miskin. Untuk itu, dalam

mengurangi penyandang masalah kemiskinan serta meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial, pemerintah memiliki peran dalam menanggulangi kemiskinan dengan banyak kebijakan.

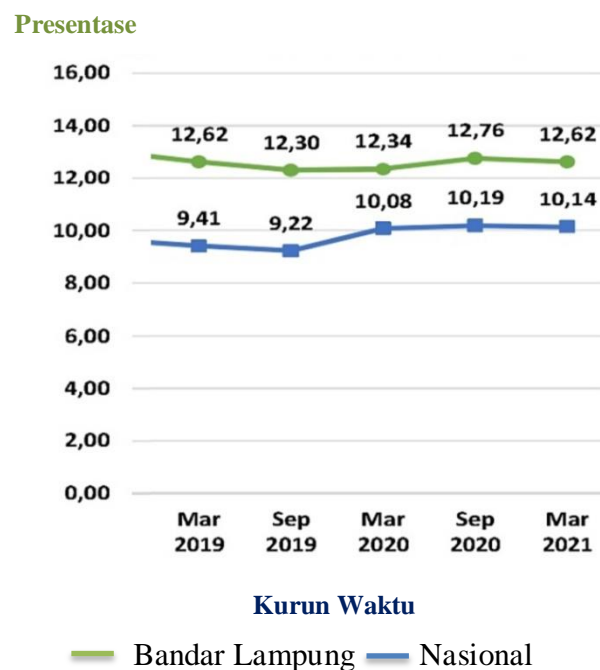
Kemiskinan secara umum dilihat atas dasar pemenuhan kebutuhan atau materi yang dapat diukur berdasarkan tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi suatu rumah tangga dengan jumlah minimum kebutuhan hidup. Akan tetapi saat ini kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan lanjutan program *Milennium Developments Goals* (MDGs) yang selesai pada tahun 2015, dengan diluncurkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) diharapkan dapat meneruskan keberhasilan 8 (delapan) program *Milennium Developments Goals* (MDGs) dalam menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di dunia. Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mengentaskan kemiskinan yang merupakan masalah multidimensi. Sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran dalam menyediakan data-data yang selanjutnya digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwasanya setiap daerah sudah harus mulai mengimplementasikan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) guna tercapainya tujuan di tahun 2030 nanti serta menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibuat oleh pemerintah pusat. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan global yang dilaksanakan dalam pembangunan nasional dan

daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berperan untuk membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah daerah memiliki dana dan berwenang untuk melakukan inovasi dalam bentuk pelayanan publik dan kebijakan lainnya.

Secara umum, pada tahun 2019 - 2020 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan taraf kesejahteraan di masyarakat. Namun dalam rentang waktu tersebut juga tercatat terjadi beberapa kali kenaikan angka kemiskinan dibanding periode sebelumnya, seperti yang terjadi pada pengukuran tahun 2020 - 2021. Kenaikan angka kemiskinan di Bandar Lampung pada tahun 2021 terjadi bersamaan dengan melemahnya perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) diketahui bahwa kenaikan angka kemiskinan di Bandar Lampung pada bulan Maret tahun 2019 angka kemiskinan mencapai 12,62%. Pada bulan September tahun 2019 angka kemiskinan mencapai 12,30%. Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 2020 angka kemiskinan mencapai 12,34%. Pada bulan September tahun 2019 angka kemiskinan mencapai 12,76%. Kemudian, pada bulan Maret tahun 2021 angka kemiskinan mencapai 12,62%.

Kemiskinan masih menjadi masalah di berbagai negara khususnya di Kota Bandar Lampung, maka penanggulangan kemiskinan menjadi sasaran utama dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama tersebut harus menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Kemiskinan yang menjadi tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Permasalahan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yaitu melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meskipun tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung selama tahun terakhir menunjukkan penurunan, tetapi Bandar Lampung masih harus menaruh perhatian pada kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.

Tabel 1. Data Penduduk Miskin di Lampung

1	2	3	4
Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	39,05	38,12	39,36
Tanggamus	71,90	70,37	71,89
Lampung Selatan	144,44	143,33	145,85
Lampung Timur	158,90	153,57	159,79
Lampung Tengah	153,84	152,28	155,77
Lampung Utara	122,65	119,35	121,91
Way Kanan	58,72	58,41	59,89
Tulang Bawang	42,06	42,43	44,53
Pesawaran	67,36	66,04	68,31
Pringsewu	40,55	40,12	41,04
Mesuji	14,94	14,72	15,24
Tulang Bawang Barat	21,14	20,29	23,03
Pesisir Barat	22,38	22,24	23,23
Bandar Lampung	91,24	93,74	98,76
Metro	14,49	14,31	15,32
Provinsi Lampung	1.063,66	1.049,32	1.083,93

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa total penduduk miskin di Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 sebesar 8,68% dari 1.051.500 total penduduk, pada tahun 2020 berkurang menjadi 8,03% dari 1.66.066 total penduduk, pada tahun 2021 bertambah lagi menjadi 8,33% dari 1.184.949 total penduduk.

Angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung yang cenderung melambat dalam 3 (tiga) tahun terakhir ternyata tidak diimbangi dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Bandar Lampung yang mengalami kenaikan dan perkembangan yang pesat, masih tingginya angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

Tingkat kemiskinan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bandar Lampung Nomor 518/III.17/HK/2013 tentang penetapan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai lembaga penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan se-Kota Bandar Lampung menjelaskan

bahwa kemiskinan terbagi menjadi 3 (tiga) miskin, miskin sekali dan paling miskin. Miskin yaitu apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 Kg nilai tukar beras per orang per tahun sedangkan miskin sekali apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 Kg nilai tukar beras per orang per tahun serta paling miskin yaitu apabila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Untuk memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan sesuai dengan kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan, diperlukan pedoman yang dapat dijadikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan program di pusat maupun daerah.

Alasan Peneliti memfokuskan Program Keluarga Harapan (PKH) karena Kota Bandar Lampung sebagai daerah yang pertama kali menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2009. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggulan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berdasarkan data yang Peneliti temukan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung terdapat 34.444 dari total 76.553 rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Kota Bandar Lampung yang telah memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Artinya, sebesar 44.99% rumah

tangga dengan status kesejahteraan terendah di Kota Bandar Lampung yang telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Aspek yang dikaji program *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak hanya dari sisi pendapatan atau kapasitas ekonomi rumah tangga miskin, melainkan juga aspek nonmeteri, seperti faktor lingkungan, pendidikan, keluarga, sampai dengan budaya dan pola hidup sehari-hari anggota keluarga rumah tangga miskin.

Pemerintah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis) untuk menyusun program pengentasan kemiskinan terpadu, akurat dan terukur. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis) adalah aplikasi sistem informasi data kemiskinan dan proses kependudukan yang terpadu dan terintegrasi, yang dikembangkan dengan teknologi berbasis *web (client server)* untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih cepat, mudah efisien, dan tepat sasaran.

Adanya manajemen aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis) ini minimal dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan, supaya mempercepat akselerasi dan supaya progresnya cepat berjalan. Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis) juga dapat mendata masyarakat miskin berdasarkan nama dan alamat, sehingga dapat dituju warga mana yang memerlukan bantuan dari pemerintah. Dengan penerapan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis), pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan berkaitan dengan usaha – usaha pengentasan kemiskinan.

Data yang akurat dan terstruktur, menjadikan pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran yang pada akhirnya nanti menurunkan angka kemiskinan. Dalam penyebarluasan informasi pentingnya kepada masyarakat dan penyedia data-data berkualitas untuk penghitungan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi terutama bagi Kota Bandar Lampung, bahwa dengan data berkualitas tentu akan bermuara pada perencanaan dan hasil *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bandar Lampung yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis juga membandingkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi Penulis dalam melakukan penelitian yang akan disajikan dalam bentuk deskripsi sebagai berikut :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

1	2	3	4
No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Dede Ruslan (2016)	Evaluasi <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs) dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Menuju <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Kota Medan	Kondisi capaian pembangunan di Kota Medan melalui indikator <i>Millienium Development Goals</i> (MDGs) pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dimana dari 7 indikator yang dicanangkan sebagian besar kegiatan sudah tercapai, diantaranya yaitu : Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan pada umumnya sudah tercapai yaitu terkait dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Laju PDRB per tenaga kerja, Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, Prevalensi Balita dengan berat badan rendah atau kekurangan gizi, Prevalensi

1	2	3	4
			balita gizi buruk, Prevalensi balita gizi kurang kecuali untuk tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja belum tercapai.
2.	Ishartono dan Santoso Tri Raharjo (2020)	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan	Pekerjaan Sosial mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah kemiskinan. Sudah berabad-abad profesi ini bergelut dan terlibat dalam penanganan kemiskinan. Secara historis profesi Pekerjaan Sosial boleh dikatakan lahir dari masalah kemiskinan. Profesi ini bahkan menempatkan masalah kemiskinan sebagai bidang utama yang ditangani Pekerjaan Sosial. Jika sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia, Pekerjaan Sosial harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs) yang kemudian bergeser ke <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) merupakan tujuan bersama yang memerlukan pengalawan bersama baik vertikal maupun horizontal.
3.	Nurul Bariyah (2021)	Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat: Menuju <i>Sustainable Development Goals</i>	Tujuan yang ditetapkan dalam <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), meskipun belum menunjukkan pembangunan pendidikan yang merata. Dari sisi capaian tingkat kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup

1	2	3	4
		(SDGs)	dan Persentase Peserta BPJS Kesehatan, meskipun tidak berbeda signifikan dengan capaian nasional, tetapi angkanya masih jauh dari capaian global. Bertolak dari kajian ini, penelitian berikutnya di agendakan untuk dapat <i>mentrace</i> dampak Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang khususnya berkenaan dengan Tingkat Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan.

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Perbedaan penelitian yang akan Penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengkaji bagaimana program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penanggulan kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kajian Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan pemikiran Pemerintah Kota Banda Lampung dalam mengimplementasikan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Implementasi

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok untuk mewujudkan tujuan kebijakan manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Implementasi mencakup banyak macam kegiatan, badan-badan ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar, sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, dan uang, dan badan-badan juga mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret. (Winarno Budi, 2012).

Menurut Syauckani dkk (2004:295) implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada publik sehingga kebijakan tersebut dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Sedangkan Menurut Agustino (2014:139) implementasi merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan dan pada akhirnya akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Donald S. Van Meter dan Carl E. Vanhorn (1975:447), proses implementasi adalah arah yang diambil individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan ketika mengimplementasikan suatu kebijakan, dan tentunya mengimplementasikan suatu kebijakan harus sesuai dengan peraturan.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permofmansi suatu paham kebijakan yang pada dasarnya secara senaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut, yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada dilevel peleksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasi (Agustino 2006). Van Meter dan Va Horn (Sulaeman 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pera pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingan ketecapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

3. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan

kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Proses implementasi dapat dianggap selesai ketika sistem yang diterapkan telah dinilai dengan benar dan diterapkan secara permanen pada pekerjaan. Menurut Tayibnapi (2008:9) menjelaskan program merupakan segala sesuatu yang dicoba dilakukan seseorang dengan harapan akan ada akibat atau hasil. Berdasarkan beberapa ahli, Arikunto (2008:291) menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu program, lihatlah rangkaian kegiatan yang terjadi secara berurutan, bukan dari satu kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang singkat, program ini merupakan satu kesatuan sistem. Tayibnapi (2008) menawarkan pandangan yang berbeda tentang definisi program, yaitu segala sesuatu yang dilakukan orang dengan harapan membawa hasil atau kesuksesan. Definisi dari para ahli yang sudah disebutkan diatas, maka dapat diketahui bahwa secara umum

2.2 Tinjauan tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) itu sendiri lahir pada kegiatan Konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di *Rio de Janeiro* tahun 2012. *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini meliputi 4 (empat) dimensi yaitu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan *governance* (tata kelola). Hal ini sejalan dengan konsep baru pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah 5P. Pertama, *people* meliputi prinsip dasar hak asasi manusia, inklusivitas, dan antidiskriminasi. Kedua, *planet* mencakup prinsip berkelanjutan generasi mendatang. Ketiga, *peace* berupa prinsip perdamaian dan keadilan. Keempat, *prosperity* meliputi prinsip kesejahteraan bagi semua. Kelima, *partnership* mencakup prinsip kerja sama dari semua pemangku kepentingan, pemerintah, komunitas, akademisi, dan dunia usaha. Prinsip ini bahkan juga sudah diadopsi dalam bisnis sehingga menjadi bisnis yang berkelanjutan (*sustainability business*).

Indikator yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh indikator bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi sehingga pembangunan diterima secara sosial, ramah terhadap lingkungan, dan menguntungkan secara ekonomi. menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 5 (lima) pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai 3 (tiga) indikator mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 (tujuh belas) indikator global yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Global ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

1	2	3
Berkaitan Langsung dengan Kemiskinan		
1.	Tanpa Kemiskinan	Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia
2.	Tanpa Kelaparan	Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan

1	2	3
3.	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak yang	Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang
4.	Mengurangi Kesenjangan	Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia
Tidak Berkaitan Langsung dengan Kemiskinan		
1.	Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan	Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur
2.	Pendidikan Berkualitas	Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
3.	Kesetaraan Gender	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan
4.	Air Bersih dan Sanitasi	Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang
5.	Energi Bersih dan Terjangkau	Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya berkelanjutan dan modern untuk semua orang
6.	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
7.	Keberlanjutan Kota dan Komunitas	Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan
8.	Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab	Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi
9.	Aksi Terhadap Iklim	Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
10.	Kehidupan Bawah Laut	Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk

1	2	3
		perkembangan pembangunan yang berkelanjutan
11.	Kehidupan di Darat	Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati
12.	Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian	Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan
13.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Menyikapi 17 (tujuh belas) indikator global tersebut, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa ambisi dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut hanya akan tercapai jika dunia telah damai, aman, serta menghormati hak asasi manusia bukan di dunia di mana investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan. Terdapat 7 (tujuh) alasan mengapa *Sustainable Development Goals* (SDGs) lebih baik daripada *Millenium Development Goals* (MDGs), yaitu :

1. *Sustainable Development Goals* (SDGs) lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan beberapa lembaga internasional. Sementara *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.
2. Sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.
3. *Millennium Development Goals* (MDGs) tidak memiliki standar dasar Hak Asasi Manusia (HAM). *Millennium Development Goals* (MDGs) dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara *Sustainable Development Goals* (SDGs) dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik.
4. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah program inklusif 7 (tujuh) target *Sustainable Development Goals* (SDGs) sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk antidiskriminasi.
5. Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil.
6. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai dapat menginspirasi negara-negara di dunia dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
7. *Conference of the Parties 21* (COP21) di Paris melahirkan perjanjian global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon dan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim adalah salah satu kesempatan untuk maju.

Faktor yang mempengaruhi *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu :

1. Tersedia sumber daya alam (SDA) yang melimpah
2. Sumber daya manusia (SDM) yang sudah mampu di bidang pembangunan
3. Kemampuan penguasaan teknologi
4. Kondisi sosial budaya masyarakat
5. Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat

2.3 Tinjauan tentang Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin

Kemiskinan merupakan perbedaan kesempatan untuk mengumpulkan basis kekuasaan sosial mencakup kapital yang produktif atau asset, asal-sumber keuangan, organisasi politik dan sosial yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan Bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain sebagainya dan pengetahuan juga keterampilan yang mencakupi serta ino yang bermanfaat buat memajukan kehidupan mereka (Friedman, 1979 dalam Kasim,2006:47).

Jordan mengartikan *the poor are people whose lack of resources damage their capacity to participate in a market environment*". Artinya, orang miskin merupakan orang-orang yang karena kekurangan sumber daya pada dirinya mengakibatkan rusaknya kapasitas untuk berpartisipasi dalam lingkungan pasar/dunia usaha. Sedangkan Menurut Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki 5 (lima) dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of mergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung yang cenderung melambat dalam 3 (tiga) tahun terakhir ternyata tidak diimbangi dengan pertumbuhan perekonomian di Kota Bandar Lampung yang mengalami kenaikan dan perkembangan yang pesat, masih tingginya angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung sehingga Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung membuat sebuah program untuk pengentasan kemiskinan yang ada di perkotaan, beberapa program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung antara lain Program Bantuan Modal Pinjaman Lunak dan Koperasi (BMPLK), Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Dagang (DBUKID), Peningkatan Pelayanan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (P2USEP), Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Program Pemberdayaan Masyarakat, Berkelanjutan (P2MB), Program Perluasan Kerja Sistem Padat Karya Program Awal Tahun dan Padanan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pos Pemberdayaan Masyarakat (Posdaya) dan Perogram Gerakan Masyarakat Membangun (GEMMA) Tapis Berseri.

Dalam implementasinya program-program tersebut acapkali tidak bisa berjalan sesuai target dan tujuan, program tersebut dirancang tanpa menghiraukan karakteristik masing-masing kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung serta tidak melihat perbedaan persoalan yang dihadapi di setiap masyarakat yang ada di kelurahan. Selama ini masyarakat cuma dituntut partisipasinya tanpa dilibatkan dalam perencanaan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya, selain itu program-program tersebut dianggap telah berhasil dalam mengatasi kemiskinan hanya ketika program tersebut masih berlangsung setelah program tersebut selesai, maka pemerintah dan masyarakat juga selesai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pernah dicanangkan dalam program pengentasan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan bukan hanya pada tingkat perencanaan, tetapi harus adanya sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah, baik di wilayah pedesaan maupun di daerah perkotaan dengan menyesuaikan karakteristik dari wilayah masing-masing. Dalam rangka pembangunan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan harus diupayakan oleh setiap komponen dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator untuk pengentasan kemiskinan masyarakat, dan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan mempunyai produktifitas yang tinggi dalam pengolahan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan prinsip *sustainable development*.

2.3.2 Penyebab Kemiskinan

Apabila dipandang dari sisi ekonomi, Sharp (1996) menyatakan penyebab kemiskinan dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: 1). Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; 2). Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas

sumberdaya manusia; 3). Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Menurut Ginandjar, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan di antaranya; “rendahnya tingkat pendidikan,rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian.”. Dalam laporan yang dikeluarkan dari *World Bank* diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat memengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu; pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis.

Nazara mengemukakan bahwa; 1). Kemiskinan dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi. 2). Kemiskinan dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. 3). Hubungan antara kemiskinan dengan gender, penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki. 4). Hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastuktur. 5). Lokasi geografis, ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan bahwa :

“Penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan kronis (*chronic povety*) yang disebabkan: (1) Sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif. (2) Keterbatasan sumber daya dan keterisolasian. (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.”

Selain itu, dalam melihat kemiskinan ada dimensi lain yaitu dimensi bukan pendapatan, seperti rendahnya pencapaian di bidang pendidikan dan penyediaan akses pada pelayanan dasar di berbagai daerah terutama di wilayah timur Indonesia, hal ini semakin mempertegas adanya kesenjangan berdasarkan lokasi geografis. Faktor-faktor tersebut ada keterkaitan satu sama lainnya yang membentuk lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah perdesaan, karena berpendidikan rendah, maka produktivitasnya rendah sehingga imbalan yang akan diperoleh tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Akibatnya, rumah tangga miskin akan menghasilkan keluargakeluarga miskin pula pada generasi berikutnya.

Terkait dengan permasalahan kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berkordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada untuk menuntaskan kemiskinan secara perlahan di Kota Bandar Lampung, maka perlu dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan hendaknya sudah disertai dengan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga atau penduduk miskin yang akan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ke depannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling memengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja tetapi multi faktor. Namun demikian secara garis besar faktor dominan yang memengaruhi timbulnya kemiskinan di antaranya; pendidikan, pendapatan, lokasi, keterbatasan akses di antaranya akses ke kesehatan, keuangan dan pelayanan publik lainnya.

2.3.3 Penanggulangan Kemiskinan

Dalam meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Peraturan Presiden tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 4. Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan

1	2	3
Klaster I Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga	Klaster II Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Klaster III Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
Tujuan : Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi	Tujuan : Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip	Tujuan : Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil

Sumber : diolah oleh Peneliti (2023)

Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai strategi, salah satunya strategi kebijakan yang berkelanjutan baik dalam mendorong pembangunan asset dan dapat menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif. Berikut ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan :

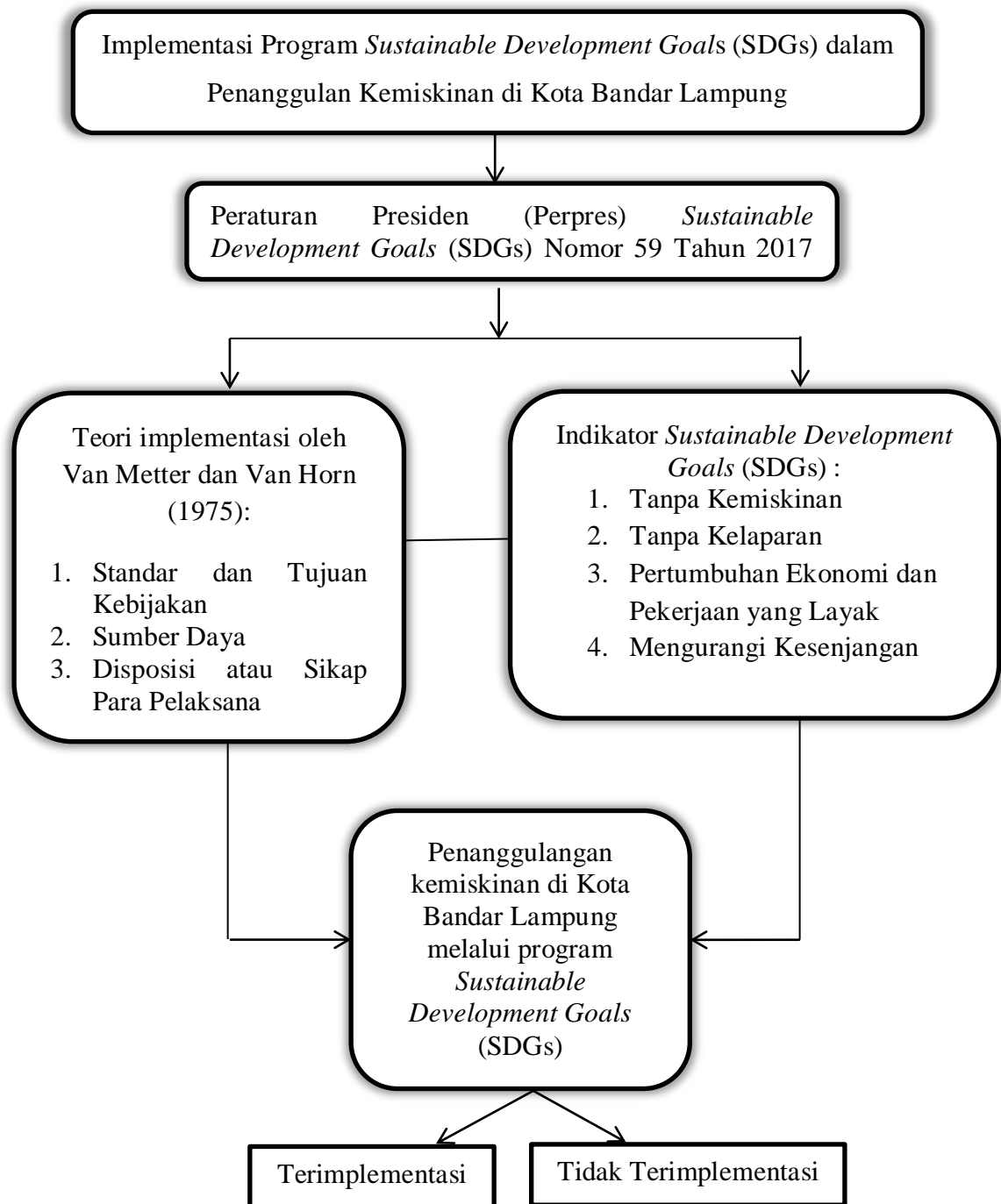
1. Menciptakan kesadaran, melalui media sosial atau *platform* lain akan memungkinkan seseorang untuk belajar lebih banyak mengenai kemiskinan global dan akan meningkatkan kesadaran umum akan masalah ini.
2. Ambil tindakan sendiri, seperti mendanai pendidikan anak miskin atau dengan mensponsori keluarga miskin dan mempengaruhi orang lain untuk melakukannya.
3. Melakukan donasi, seperti menyumbangkan atau melakukan donasi tidak selalu berupa uang dapat berupa buku, makanan, pakaian yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
4. Strategi kebijakan, mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang miskin. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan aset yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi kemiskinan.

2.4 Kerangka Pikir

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, sistematis dan masif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi setiap negara pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam rumusannya. Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Kota Bandar Lampung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meskipun tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung selama tahun-tahun terakhir menunjukkan penurunan, tetapi Bandar Lampung masih harus menaruh perhatian pada kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan. Peran pemerintah disini sangatlah sentral guna menyeimbangkan permasalahan ini, sehingga terciptalah program

Sustainable Development Goals (SDGs) diharapkan dapat menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di dunia.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, Penulis akan melakukan penelitian mengenai Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung, dengan menggunakan teori implementasi oleh Van Metter dan Van Horn (1975) yang di fokuskan kepada 3 (tiga) standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, dan sikap para pelaksana. Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir
(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian yang diinginkan. Menurut Neuman dalam Rohidin (2010: 44-45) bahwa “*descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, sosial setting, or relationship*”. Riset deskriptif adalah riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakteristik atau fungsi dari sesuatu hal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung dengan berbagai fenomena permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, nantinya penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang diperoleh peneliti dari informan untuk memberikan informasi yang menggambarkan penyajian laporan tersebut.

Laporan tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, catatan-catatan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan penelitian, peneliti menganalisis data tersebut dan sejauh mungkin menggambarkan sebagaimana aslinya. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh penjelasan dan gambaran atas topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian “Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung”.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penetapan penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (BAPPEDA) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TPKP) Lampung dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (BAPPEDA) yang berada di Jl. Kartini No. 12 E, Gn. Sari, Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung. Sedangkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung berada di Jl. Panglima Polim No. 1, Gedong Air, Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Lokasi tersebut karena peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (BAPPEDA) dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sangat penting dalam menanggulangi tingkat kemiskinan, dan memberikan pelayanan yang optimal adalah kewajiban pemerintah agar permasalahan kemiskinan dapat berkurang. Hal ini menarik perhatian untuk meneliti secara langsung terkait penerapan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif masalah bertumpu pada sesuatu fokus. Terdapat dua maksud tertentu dalam penetapan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong dalam Kusumastuti, 2019:25-26).

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2019: 275) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam melakukan sebuah penelitian, fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Hal ini agar seorang peneliti tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga untuk menghindari hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Penelitian ini berfokus kepada program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung, yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Penetapan fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang berada di tinjauan pustaka, yaitu implementasi yang dilihat dari 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, peneliti memberikan pertanyaan tentang latar belakang pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung dan tujuan-tujuan yang belum dan sudah dicapai, melalui sub indikator sebagai berikut :

- Para pelaksana kebijakan

Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal sebagai istilah elit politik. Pernyataan tersebut didukung oleh Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung yaitu Dr. Rein Susinde Hesty, S. Sos., M. Si menyatakan bahwa :

“Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terlibat *Sustainable Development Goals* (SDGs).” (Wawancara, 12 Desember 2022)

Selanjutnya, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu Fery Hartawijaya, S.H menyatakan bahwa:

“Ada Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang disingkat dengan (TKP2K). Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang disingkat dengan (TKP2K) adalah Lembaga Pemerintah non-struktural yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

- Kinerja kebijakan

Gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan, baik berupa keluaran kebijakan (*policy output*), maupun hasil kebijakan (*policy outcome*). Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung yaitu Dr. Rein Susinde Hesty, S. Sos., M. Si menyatakan bahwa :

“*Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung sudah di implementasikan. Program penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.” (Wawancara, 12 Desember)

2. Sumber Daya

Dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan secara mendalam mengenai pelaksanaan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari aspek baik itu dari anggaran maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui sub indikator sebagai berikut :

- Finansial

Perencanaan dan penerapan tata kelola keuangan yang baik. Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung yaitu Dr. Rein Susinde Hesty, S. Sos., M. Si menyatakan bahwa :

“Anggarannya tidak memadai sehingga menjadi tantangan penyediaan data untuk program tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).” (Wawancara, 12 Desember 2022)

Selanjutnya, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu Fery Hartawijaya, S.H menyatakan bahwa:

“Belum tersedianya anggaran yang memadai baik yang ada di Kementerian atau Lembaga (K/L) maupun di daerah menjadi tantangan penyediaan data *Sustainable Development Goals* (SDGs).” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

- Waktu

Seluruh rangkaian proses. Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung yaitu Dr. Rein Susinde Hesty, S. Sos., M. Si menyatakan bahwa :

“Iya, setiap tahun ada sosialisasi mengenai program *Sustainable Development Goals* (SDGs).” (Wawancara, 12 Desember 2022)

3. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Dalam dimensi ini peneliti ingin mengetahui bagaimana sikap pelaksana terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, melalui sub indikator sebagai berikut :

- Menerima yaitu merasa cukup atas hasil yang telah di upayakan. Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu Fery Hartawijaya, S.H menyatakan bahwa :

“*Sustainable Development Goals* (SDGs) dirasakan banyak timbulnya dampak yang menjadi salah satu cara mengatasi permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.” (Wawancara 9 Desember 2022)

Selanjutnya, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung yaitu Dr. Rein Susinde Hesty, S. Sos., M. Si menyatakan bahwa :

“*Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat untuk menggerakkan roda perekonomian Kota Bandar Lampung sekaligus menghasilkan produk-produk unggulan Kota Bandar Lampung. Selain itu, sektor ekonomi masyarakat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi terbatasnya kebutuhan akan lapangan kerja bagi golongan miskin dan para penganggur terdidik.” (Wawancara 12 Desember 2022)

- Netral yaitu sikap yang tidak memihak dan tidak membela pihak mana pun. Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung yaitu Dr. Rein Susinde Hesty, S. Sos., M. Si menyatakan bahwa :

“Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terlibat *Sustainable Development Goals* (SDGs).” (Wawancara, 12 Desember 2022)

Selanjutnya, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu Fery Hartawijaya, S.H menyatakan bahwa:

“Ada Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang disingkat dengan (TKP2K). Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Aceh yang disingkat dengan (TKP2K) adalah Lembaga Pemerintah non-struktural yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.” (Wawancara, 9 Agustus 2022)

Berdasarkan dari 2 (dua) sub indikator tersebut saling berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan pribadi dan sebagainya.

3.4 Informan Penelitian

Informan dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik pemilihan informan yang akan di wawancarai dilakukan secara *purposive*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tersebut, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dan kita teliti. Dalam penentuan sampel dalam penelitian kualitatif biasa peneliti mulai menentukan pada awal memasuki lapangan dan selama peneliti berlangsung (Sugiyono, 2019: 289). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 5. Informan Penelitian

1	2	3
No.	Nama Informan Penelitian	Jabatan Informan Penelitian
1.	Fery Hartawijaya, S.H	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
2.	Dr. Rein Susinde Hesty, S. Sos., M. Si	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung
3.	Abdul Latif	Masyarakat
4.	Gunawan	Ketua RT

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

3.5 Jenis Data

Data merupakan hasil pengamatan yang didapatkan oleh Peneliti melalui penelitian yang dilakukan, data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi sebuah informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Jika dilihat dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder (Sarwono, 2006: 206).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari para informan, hasil observasi terhadap peristiwa dan keadaan data yang diambil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung atas kebijakan pemerintah, dan fakta-fakta dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berkaitan dengan hal itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh Peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan oleh Peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Data primer ini berupa hasil wawancara Peneliti dengan narasumber yang direkam dan Peneliti melakukan observasi langsung mengenai Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung yang kemudian Peneliti dokumentasikan dalam bentuk gambar yang ada di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mencari fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan. Data bersumber dari dokumentasi berupa surat kabar, *website*, artikel dan referensi yang berhubungan dengan Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Undang-Undang atau peraturan, surat-surat keputusan, dan foto-foto di lapangan yang berkaitan dengan Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019: 296). Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui percakapan antara si penanya dan si penjawab. Sementara menurut Esterberg dalam Sugiyono, (2019: 304) menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasilnya dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Hasil wawancara mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung, Peneliti melakukan wawancara dengan Ferry Hartawijaya selaku Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada 9 Desember 2022 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, Peneliti melakukan wawancara dengan Dr. Rein Susinde Hesty, S. Sos., M. Si selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung pada 13 Desember 2022 pukul 10.00 WIB di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung. Kemudian, Peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Latif selaku Masyarakat Kota Bandar Lampung pada 16 Desember 2022 pukul 14.00 WIB di pekarangan rumah.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Menurut Sarwono (2006: 224) observasi merupakan suatu kegiatan yang meliputi pencacatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam melakukan kegiatan observasi,

peneliti wajib turun ke lapangan untuk dapat mengamati suatu hal dalam penelitiannya. Peneliti melakukan pengamatan (observasi) dan menemukan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dapat diketahui secara lebih rinci mengenai kondisi dan posisi penduduk miskin dengan melihat profil sosial ekonomi, dan keberadaan penduduk miskin yang terverifikasi secara berkala. Di sisi lain, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) juga menggunakan indikator-indikator kesejahteraan seperti sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, sebagai alat ukur kemiskinan. Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dokumen yang Peneliti temukan melalui buku Kota Bandar Lampung Dalam Angka Bandar Lampung *Municipality In Figures*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Sugiyono (2019: 314) dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumentasi dijadikan sebagai alat bantu untuk pengumpulan data dalam memperoleh data sekunder. Data dalam dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, video, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Dokumentasi dilakukan pada 9 Desember 2022 pukul 10.00 WIB, 13 Desember 2022 pukul 10.00 WIB, dan 16 Desember 2022 pukul 14.00 WIB. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang berbentuk dokumen-dokumen untuk memperoleh berbagai keterangan atau informasi, termasuk catatan penting tentang implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Mengolah data kualitatif yang berkenaan dengan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung maka Peneliti mengolah data berupa program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung, garis kemiskinan di Kota Bandar, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kepadatan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan di Kota Bandar Lampung, presentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan di Kota Bandar Lampung, pencapaian akseptor keluarga berencana (KB) aktif menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung, dan tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung berdasarkan beberapa langkah dan petunjuk pelaksanaan. Analisis data kualitatif yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka seperti yang dikatakan B. Miles dan Michael Huberman dalam Hardani & dkk, (2020) analisis data kualitatif yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.

Data berupa program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung, garis kemiskinan di Kota Bandar, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kepadatan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan di Kota Bandar Lampung, presentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan di Kota Bandar Lampung, pencapaian akseptor keluarga berencana (KB) aktif menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung, dan tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan yang terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan dibagi dalam empat alur

kegiatan yang terjadi secara bersamaan B. Miles dan Michael Huberman dalam Hardani & dkk, (2020), yaitu :

1. *Editing*

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data mengenai program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung, garis kemiskinan di Kota Bandar, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kepadatan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan di Kota Bandar Lampung, presentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan di Kota Bandar Lampung, pencapaian akseptor keluarga berencana (KB) aktif menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung, dan tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung yang dikumpulkan dapat memberikan suatu kejelasan penelitian yang layak ditampilkan. Data-data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dilakukan penyuntingan kata-kata dan dideskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah peneliti gabungkan dan sajikan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk menganalisa kembali data penelitian yang telah dideskripsikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pada tahap intrepretasi penelitian ini, data berupa program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung, garis kemiskinan di Kota Bandar, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kepadatan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan di Kota Bandar Lampung, presentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan di Kota Bandar Lampung, pencapaian akseptor keluarga berencana (KB) aktif menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung, dan tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung

yang sudah terkumpul dan diedit oleh Peneliti akan dicocokkan kembali dan digabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dijabarkan sehingga Peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil penelitian yang relevan.

Hasil penjelasan diatas menjelaskan tentang pedoman untuk pengolahan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian dalam ilmu pengetahuan sosial bergantung pada pengamatan terhadap manusia. Peneliti ingin melihat bagaimana implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini lebih banyak uraian dari hasil wawancara dan dokumentasi mengenai implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Noeng Muhadjir dalam Rijali (2018: 84) mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman Peneliti mengenai implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

Dalam proses analisis data dibagi ke dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2019: 321). Ketiga alur tersebut yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses analisis dalam merangkum, memilih, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

mengenai implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah Peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam uraian singkat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Upaya dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama di lapangan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian merupakan pengambilan intisari dari hasil temuan penelitian yang menggambarkan pendapat akhir berdasarkan uraian-uraian sebelumnya mengenai implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

3.9 Teknik Validitas Data

Menurut Sugiyono (2019: 361) validitas merupakan derajat ketepatan antara data program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung, garis kemiskinan di Kota Bandar, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kepadatan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan di Kota Bandar Lampung, presentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan di Kota Bandar Lampung, pencapaian akseptor

keluarga berencana (KB) aktif menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung, dan tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan pada Peneliti.

Hal ini menjelaskan bahwa data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh Peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian mengenai implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Dalam proses validasi data ada beberapa beberapa tahapan dalam teknik pemeriksaan validasi. Teknik validasi merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen berupa program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung, garis kemiskinan di Kota Bandar, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kepadatan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan di Kota Bandar Lampung, presentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan di Kota Bandar Lampung, pencapaian akseptor keluarga berencana (KB) aktif menurut kecamatan di Kota Bandar Lampung, dan tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung, hal ini bertujuan agar semua data yang disajikan nantinya dapat dinikmati dari segala sisi (Lexy Moleong, 2017). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan validitas data sebagai *instrument* penelitian yang dapat menemukan suatu kondisi atau kejadian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan validitas data dengan metode triangulasi.

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan diskusi dengan teman agar hasil data dapat dipercaya. Peneliti melakukan triangulasi untuk meninjau kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain untuk

memeriksa keabsahan data, Peneliti melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu, Peneliti melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019:270).

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Dalam membuat laporannya, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas (Sugiyono, 2019:276-2).

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dahulu merupakan Cabang dari Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Sosial Kotamadya Bandar Lampung dan terbentuk berdasarkan peraturan Nomor 24 tahun 1996 yaitu tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Madya Derah Tingkat II Bandar Lampung. Dengan adanya aturan daerah berdasarkan peraturan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung No.12 tahun 2000 tentang pembentukan Negri Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah satuannya dibentuklah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung berdasarkan keputusan Walikota Bandar Lampung No.15 tahun 2001 yang telah direnovasi Majelis Keputusan Walikota Bandar Lampung No.30 tahun 2000.

Dinas Sosial Kota bandar Lampung memiliki beberapa pegawai dengan ikatan dinas dan honorer. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mengharuskan para pegawainya menguasai dan memahami komputer karena hampir semua pekerjaan dilakukan menggunakan komputer seperti membuat data penduduk, surat menyurat untuk keperluan Dinas Sosial dan membuat laporan tentang kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk dilaporkan ke Kementrian Sosial Republik Indonesia.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Sosial meliputi pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya tugasnya
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas lingkupnya
4. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

4.1.3 Struktur Jabatan Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Tabel 6. Struktur Jabatan Pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

1	2	3
NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sahriwansyah, SY	Kepala Dinas Sosial
2.	-	Kepala Fungsional
3.	Santoso Adhy, SE, MM	Sekretaris Dinas Sosial
4.	Dra. Hj. Faridah	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.	Darul Khotni, S. Sos	Kasubag Program dan Informasi
6.	Rushan, S. Ag	Sub Bagian Keuangan dan Aset
7.	M. Havis, S. Ag, M. Ag	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
8.	Dewi Aulia, S. Sos, MM	Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan
9.	Susilawati, SE, MM	Seksi Kepahlawanan

1	2	3
10.	Dra. Susan Takarianti, MM	Seksi Pendayagunaan
11.	Sri Wati, S. Pd	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
12.	Supriadi, S. ST	Seksi Fasilitas dan Rehabilitas Korban Narkoba
13.	Evazati, S. Sos	Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Rehabilitasi Penyandang Cacat
14.	Fery Hartawijaya, SH	Kepala Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial
15.	-	Seksi Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial
16.	Elvira Yusna Murti, S. Sos, MM	Seksi Bantuan Fakir Miskin
17.	Diah Eko Ermawanti, S. Sos	Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan
18.	Azizah AR, S. Sos, MM	Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial
19.	Yusnani, S. Sos	Seksi Pemakaman
20.	-	Seksi Keagamaan
21.	-	Seksi Data dan Informasi

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

4.1.4 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Visi :

“Melayani dengan profesional, akuntabel, dan transparan.”

Misi :

1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional
3. Mengedepankan keterbukaan dalam proses pelayanan
4. Mengembangkan layanan informasi pada masyarakat

4.2 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung

4.2.1 Sejarah Terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan pembangunan wilayah dan daerah kerjanya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, dan Permendagri Nomor 185 Tahun 1980, serta Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1981, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Era Desentralisasi atau Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung dibangun kembali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, dan ditetapkan dalam bentuk struktur organisasi “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung” berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, terdapat perubahan mendasar dan sangat signifikan, antara struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1981 dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000. Perubahan tersebut ditunjukkan oleh; (1) digantinya sebutan “Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat I Lampung” menjadi “Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung”, (2) dihapuskannya posisi Wakil Ketua Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada eselon IIB, (3) dileburkannya Organisasi Biro PDE (Pusat Data Elektronik) ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), (4) dihapuskannya “Bidang Penelitian“ pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Tetapi, pada tahun 2007 dilakukan kembali evaluasi terhadap seluruh organisasi untuk melihat efektivitas struktur organisasi yang ada sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang hasilnya ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) saat ini mendapat tambahan dua bidang kembali yaitu UPT Data dan Bidang Penelitian yang merupakan penggabungan kembali Balitbangda ke dalam organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada Tahun 2013 dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2013. Berdasarkan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 03 Tahun 2014 Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 terjadi perubahan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung dengan penambahan Bidang Pendanaan dan Pembangunan, serta penghapusan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang akan menjadi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah mengalami perubahan kewenangan sehingga nomenklatur maupun struktur organisasi OPD perlu disesuaikan. Perubahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. Penyusunan rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dalam penetapan program dan kegiatan nasional;
4. Penyusunan PPA berkoordinasi dengan TPAD;
5. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan daerah dalam rangka sinergisitas antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Pengoordinasian kelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan, serta pengalokasian dana untuk pembangunan daerah;
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh perangkat daerah Provinsi;
10. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pada Bappeda;

11. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2.3 Struktur Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung

Tabel 7. Struktur Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung

1	2	3
NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Mulyadi Irsan, M.T	Kepala Badan
2.	Dra. Evie Fatmawaty, M.Si	Sekretaris
3.	Zakiah Drajat, S.I.Kom	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Siti Masitoh, SE	Staf
5.	Agus Guntur Sukmono, SE	Kasubbag Keuangan dan Aset
6.	Syahril Jaya Saputra, ST	Staf
7.	M.Roby Satria Pratama, ST	Kassubag Program
8.	Ratih Widiyanti, SE	Staf
9.	Ir. Ahmad Lianurzen, MT	Kabid Perencanaan dan Infrastruktur Kewilayahan
10.	Riya Soneta, S. Kom	Kasubbid Perencanaan dan Infrastruktur Pengembangan Wilayah I
11.	Muhammad Fauzi, S.T., M.E	Kasubbid Perencanaan dan Infrastruktur Pengembangan Wilayah II
12.	Merylia,ST,MT,MSc	Kasubbid Perencanaan dan Infrastruktur Pengembangan Wilayah III
13.	Bobby Irawan, S.E, M.Si	Kasubbid Perencanaan Perekonomian I
14.	Haryo Wicaksono, SE	Kasubbid Perencanaan Perekonomian II

1	2	3
15.	Dharma Saputra, SE, MH	Kasubbid Perencanaan Perekonomian III
16.	Eka Yuslita Dewi, ST., MT	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
17.	Prayudi Aribowo, S.STP	Kaubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I
18.	Silfa Gusman, SE	Kaubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II
19.	Ridwan Saifuddin, S.E., M. Si	Kaubbid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III
20.	Ir.Marlina Emidianti, M.Si	Kabid Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi
21.	Era Jayanti, S.STP, MM	Kasubbid Monitoring dan Evaluasi
22.	Catur Makhmudi, S.Hut, M.I.L	Kasubbid Perencanaan Makro
23.	Salisiara, S.E	Kasubbid Pengendalian Kebijakan
24.	Belli Pahlupi, ST, MT	Kepala UPTD Pusat Data & Informasi

Sumber: diolah oleh Peneliti (2022)

4.3.4 Visi Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kota Bandar Lampung

Visi :

Rakyat Lampung Berjaya, Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing,
dan Sejahtera.

Misi :

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman, dan aman.
2. Mewujudkan (*good governance*) untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik.
3. Mengembangkan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.

4.3 Gambaran Umum mengenai *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Kota Bandar Lampung

4.3.1 Sejarah Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Kota Bandar Lampung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung, bekerjasama dengan *United Nation Development Programme (UNDP)* Indonesia, menyelenggarakan kegiatan *Localizing Sustainable Development Goals (SDGs)* di Lampung atau melokalkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung pada 31 Oktober 2017 bertempat di *Swissbell Hotel* dan dihadiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, Bupati atau Walikota, Sekretaris Daerah Provinsi atau Kota, Pimpinan Instansi Vertikal, Akademisi, Kalangan Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa di Provinsi Lampung, selain itu juga turut hadir unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN atau BAPPENAS), *United Nations Development (UNDP)* Indonesia, Sekretariat *Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Riau.

Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung memandang perlu untuk mengadopsi sebagai cara untuk membangun daerahnya. Kota Bandar Lampung, di samping keberhasilannya membangun ekonomi, masih menghadapi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, terutama antar kabupaten aatau kota.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah mulai meluncurkan program untuk melokalkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selanjutnya, adalah menyusun rencana aksi untuk merealisasikannya. Mengingat banyaknya tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), ada baiknya dilakukan pengelompokan berdasarkan tingkat kepentingan untuk lebih diutamakan. Hal ini bisa dilakukan secara partisipatif melalui penyerapan aspirasi masyarakat.

Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dilaksanakan sebagai langkah lanjutan pasca berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs). Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah diadaptasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung dan kontribusinya terhadap Nasional, kegiatan di Kota Bandar Lampung berusaha mencapai 3 (tiga) isu utama yaitu :

1. Pengintegrasian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota)
2. Meningkatkan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan dengan menjadikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai isu pembangunan bersama
3. Ketersediaan alat ukur kinerja berupa data yang berkualitas, terintegrasi dan mudah diakses.

4.3.2 Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung

Program-program pengentasan kemiskinan melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut :

1. Program Bedah Rumah
2. Program Pemanfaatan Lahan Pekarangan
3. Program Penyediaan Fasilitas Kesehatan
4. Program Bina Lingkungan (BILING)
5. Program KPBU SPAM
6. Program WASH SDG
7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan Pariwisata
8. Program Keluarga Harapan (PKH)

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Peneliti menarik kesimpulan mengenai program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung kurang berhasil, disebabkan oleh :

1. Pada indikator sumber daya mengenai program *Sustainable Development Goals* (SDGs) kurang berhasil menerapkan nilai implementasi kebijakan. Kurang berhasilnya sumber daya disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada sudah baik akan tetapi belum sempurna mengarah kepada program *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga perlu ada perbaikan agar nantinya tujuan yang diinginkan bisa selaras dengan implementasi yang dilakukan.
2. Pada indikator disposisi atau sikap para pelaksana mengenai program *Sustainable Development Goals* (SDGs) cukup berhasil menerapkan nilai implementasi kebijakan. Cukup berhasilnya disposisi atau sikap para pelaksana dikarenakan Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung dan Bupati atau Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung atau Kota Bandar Lampung.

Implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung memiliki berbagai macam hambatan seperti di atas. Namun, pada indikator standar dan tujuan kebijakan mengenai program *Sustainable Development Goals* (SDGs) sudah berhasil menerapkan nilai implemetasi kebijakan karena program *Sustainable Development Goals* (SDGs) sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah merealisasikan berbagai macam program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengentaskan kemiskinan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, Peneliti memandang bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah telah berusaha menerapkan nilai implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan baik. Namun, pada nilai yang belum berhasil diterapkan Peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu :

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung, sebaiknya menambahkan pelatihan yang dapat membentuk kualitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), pelatihan tersebut dapat berbentuk pelatihan data *science*, pemahaman tentang kemiskinan, dan hal apapun yang dapat membentuk kualitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), serta kualitas program *Sustainable Development Goals* (SDGs).
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung, sebaiknya memperkuat dalam menjalin komunikasi terkait program *Sustainable Development Goals* (SDGs) agar sinergitas antar Pemerintah Kota Bandar Lampung terjaga, hal ini untuk menunjang dalam mencapai keberhasilan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk dapat memprioritaskan lokasi sasaran di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI.
- Arikunto, S. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Karya.
- Budi, Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Medpress
- Budi, Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- BPS Kota Bandar Lampung. 2022. *Kota Bandar Lampung Dalam Angka Bandar Lampung Municipality In Figures*. Bandar Lampung: CV Jayawijaya.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Efendi, A'an, dkk. 1995. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farida Yusuf Tayibnapis. 2008. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasim, Muslim. 2006. *Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya*. Jakarta: Indomedia.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kusumastuti, Adhi. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horrn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administation and Society*. London: Sage.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Noeng, Muhadjir. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*. Yogyakarta: Yogya Pustaka.
- Wahab, Abdul, 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang UMM Press
- Wayne Parsons, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 467. 16

Jurnal

- Bariyah, Nuru. (2021). Pendidikan, Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Barat: Menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 11 No. 1
- Choiriyah. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Jurnal Islamic Backing*, Vol. 3 No. 2
- Dzulqarnain, Ghulam Zakiyyan., Meigawatim Dine., & Basori, Yana Fajar. (2022). Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *Jurnal Professional*, Vol. 9 No.1
- Fachrudin, Reza. (2015). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik*, Vol. 4 No. 2
- Muktazam dan Nurjanah, S. (2011). Kajian kritis atas fenomena dan program pengentasan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan di pulau Lombok. Laporan penelitian.
- Murdiyana., Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengetasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan*, Vol. 10 No. 1

Internet

- Ajeng, Ginandjar. (2013). *Kemiskinan di Perkotaan (Pengemis)*. <http://id.scribd.com/doc/94202160/MAKALAH-KELOMPOK-3> [diakses pada tanggal 20 Mei 2013]
- Badan Pusat Statistik. 2015. Data dan Informasi Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia. Lampung: BPS Provinsi Lampung
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (2012). *Sustainable Development Goals*. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>
- Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM, PSPK UGM, dan Ford Foundation. (2014). *Press Release*. Hasil evaluasi penelitian efektivitas program pengentasan kemiskinan di 15 kabupaten/kota di Indonesia. Diperoleh tanggal 11 Desember 2014, dari www.academia.edu/.../Tinjauan_Terhadap_Efektivitas
- Survei Sosial Ekonomi Nasional. 2015. Provinsi Lampung. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahtera Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Presiden *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
- Peraturan Presiden Nomor. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten atau Kota

Peraturan Menteri Sosial Nomor. 1 Tahun 2018 tentang PKH

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nomor 32/SOP.BAPPEDA/2021 tentang Perencanaan dan Monitoring Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SGDs).

Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 518/III.17/HK/2013 tentang penetapan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/394/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung